

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Gafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Logika Antropologi*, Prenadamedia, Jakarta, 2015.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua; Penerbit Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor Selatan, 2008.
- Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Antonius Sujata, *Efektifitas Komisi Ombudsman Nasional*, Cetakan Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002.
- Bryan A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, West Thomson Reuters, United States, 2019.
- Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2005.
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif-deskriptif*, Rindi Press, Jakarta, 1995.
- Ibrahim al-Wahab, *The Swedish Institution of Ombudsman*, Liber Forlag, Stockholm, 1979. Dikutip oleh Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.

- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deeepublish, Yogyakarta, 2019.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pengembangan Dunia Ketiga*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1999.
- Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- P. Appleby, *Morality and Administration In Democratic Government*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1952.
- Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Ralf Darhendrof, "Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional" dalam *Pengantar Sosiologi Politik*, ed. Damsar, Kencana, Jakarta, 2010.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Idris Patarai, *Ombudsman Kota Makassar, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar*, Jakarta, 2008.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persana, Jakarta, 2013.
- Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Sondang Siagian, *Filosafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Widarta, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan*, Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagad Raya, Mizan, Bandung, 2001.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

## **TESIS, JURNAL, ARTIKEL ILMIAH**

- A. Mukhopadhyay, *Indian Jurnal of Publick Administration: Administrative Accountability: A Conceptual Analysis*. 1983.
- D.P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 & 2, terj. Gramedia, Jakarta, 1986. Dalam tesis Mul'jizad Abdurrazak, *Hadis Hukuman Mati, Pendekatan Sistem Sosial Talcott Parson*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Ombudsman Daerah dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Daerah: Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY*, Jurnal, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- I Wayan Arthanaya. *Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Kertha Wicaksana, Volume 7 (2), 2011.

Iman Dani, *Independensi Ombudsman*, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, 2018, dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2022.

Imran Eka Saputri dan Hasnan Hasbi, *Efektivitas Pengawasan Ombudsman Kota Makassar Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Makassar*, Kalabirang Law Journal, Volume 3 Nomor 2 September 2021.

Juharni dan Umar Congge, *Efektifitas Kinerja Ombudsman Kota Makassar*, Jurnal Ilmiah Administrasita', Volume 4 No. 1 Juni 2014, dalam <https://jurnal-umsi.ac.id>. Diakses pada tanggal 27 April 2022,

Muhammad Imam Susanto, *Tinjauan Yuridis terhadap Eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Provinsi Riau*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum, Volume I No. 2 Oktober 2014.

Shirley A. Wiegand, "A just and Lasting Peace: Supplanting Mediation with the ombuds Model", *12 Ohio State Journal on Dispute Resolution*, <[https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/79770/OSJDR\\_V12\\_N1\\_095.pdf](https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/79770/OSJDR_V12_N1_095.pdf)> diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

Andi Bau Medlin AR, *Pelaksanaan Tugas Ombudsman Kota Makassar dalam Menindaklanjuti Temuan Maladministrasi pada Dinas Perangkat Daerah*, Tesis Program S2 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021.

## **INTERNET**

<https://www.ombudsman.go.id> Diakses pada Tanggal 20 Februari 2022.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konfigurasi>. Diakses pada Tanggal 25 April 2022.

JDIH BPK RI dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39708>. Diakses pada Tanggal 6 Desember 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/konfigurasi.html>. Diakses pada Tanggal 27 April 2022.

Ombudsman Republik Indonesia, Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Diakses pada [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 62/PUU-VIII/2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ombudsman Kota Makassar.

## **DATA/WAWANCARA**

Laporan Tahunan Ombudsman Kota Makassar 2019.

Laporan Tahunan Ombudsman Kota Makassar 2020.

Laporan Tahunan Ombudsman Kota Makassar 2021.

Laporan Tahunan Ombudsman Kota Makassar 2022.

Laporan Tahunan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Daftar Kasus 2019 Ombudsman Kota Makassar

Daftar Kasus 2019 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan

Daftar Kasus 2020 Ombudsman Kota Makassar

Daftar Kasus 2020 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan.

Daftar Kasus 2022 Ombudsman Kota Makassar.

Daftar Kasus 2022 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Ombudsman Kota Makassar Periode 2019-2023.

Wawancara dengan Andi Ihwan Patiroy, Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Kota Makassar, pada Tanggal 24 November 2022.

Wawancara dengan Andi Indarwati, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kelola Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kota Makassar, pada Tanggal 25 November 2022.

Wawancara dengan Asma Suhari, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kota Makassar, pada Tanggal 15 November 2022.

Wawancara dengan Muhammad Faisal, Asisten Bidang Pengawasan Kasus Ombudsman Kota Makassar, Kota Makassar, pada Tanggal 12 Desember 2022.

Wawancara dengan Muhammad Irwan, Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Kota Makassar, pada Tanggal 24 November 2022.

Wawancara dengan Nurul Fitrahullah Abbas, Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Kota Makassar, pada pada Tanggal 17 April 2022.

Wawancara dengan Andi Anas Chaerul, Anggota Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Tanggal 25 November 2022.

Wawancara dengan Hasan (Pelapor 25 Januari 2022, Nomor Kasus: 02/KP/OKM/I/2022), Kota Makassar, pada Tanggal 22 Mei 2023.

Wawancara dengan Susinah (Pelapor 22 September 2022, Nomor Kasus: 16/KP/OKM/IX/2022), Kota Makassar, pada Tanggal 22 Mei 2023.

Wawancara dengan Roswati (Pelapor 22 Agustus 2022, Nomor Kasus: 15/KP/OKM/VIII/2022), Kota Makassar, pada Tanggal 22 Mei 2023.

Wawancara dengan Nisma Niswati (Pelapor 26 Januari 2022, Nomor Kasus: 03/KB/OKM/OKM/I/2022), Kota Makassar, pada Tanggal 23 Mei 2023.

Wawancara dengan Wihelmia Siahaya (Pelapor 12 Oktober 2022, Nomor Kasus: 17/KB/OKM/X/2022), Kota Makassar, pada Tanggal 23 Mei 2023.

Wawancara dengan Ahmad Azhar Aras (Pelapor 18 Juli 2022, Nomor Kasus: 10/KB/OKM/VII/2022), Kota Makassar, pada Tanggal 23 Mei 2023.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Kota Makassar



*Gambar 1.1 Wawancara dengan Andi Indarwati, S.Sos., M.AP.*





2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar



*Gambar 2.1 Wawancara dengan Asma Suhari, S.H.*



### 3. Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar



*Gambar 3.1*  
*Wawancara dengan Ir. Andi Ihwan Patiroy, SP., MM., IPM.*



#### 4. Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar



Gambar 4.1 Wawancara dengan Dr. Muhammad Irwan, S.H., M.H.



5. Asisten Bidang Pengawasan Kasus Ombudsman Kota Makassar



*Gambar 5.1 Wawancara dengan Muhammad Faisal, S.H., M.H.*



6. Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sul-Sel



*Gambar 6.1 Wawancara dengan Andi Anas Chaerul M, S.H., M.H.*



## 7. Pelapor



*Gambar 7.1 Wawancara dengan Nisma Nismawati*





*Gambar 7.2 Wawancara dengan Ahmad Azhar Aras*





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006  
MAKASSAR  
WWW.JDIH.MAKASSAR.GO.ID

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 180/B.HUK/1167/XI/2022

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Asma Suhari, SH  
Pangkat : Penata TK.I  
NIP : 197206 200604 2 006  
Jabatan : Fungsional Sub koordinator Dokumentasi & Informasi Hukum

Menyatakan bahwa :

Nama : Muchtar Jaya  
NIM : B012201020  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum (S2) Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Fungsional Sub koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pada tanggal 15 November 2022 bertempat di Ruang Kepala Bagian Hukum sekretariat Daerah Kota Makassar.

Makassar, 15 November 2022

an: Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



**ASMA SUHARTI, SH**  
Pangkat : Penata TK.I  
NIP : 197206 200604 2 006





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email: sekda@makassarkota.go.id Home Page: <http://www.makassarkota.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 971/Org/070/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Indarwati, S.Sos., M.AP  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19750721 199803 2 008  
Jabatan : Kepala Bagian Organisas Sekretariat Daerah Kota Makassar

Menyatakan bahwa :

Nama : Muchtar Jaya  
Nim : B012201020  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum (S2) Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi, pada tanggal 07 November 2022 bertempat di Ruang Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 November 2022

Kepala Bagian Organisasi,



**ANDI INDARWATI, S.Sos., M.AP**

Pangkat : Pembina

Nip. 19750721 199803 2 008



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 47/OKM/ADM/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUCHTAR JAYA**  
No. Pokok : B012201020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 309 Makassar

Benar telah melakukan kegiatan penelitian di kantor Ombudsman Kota Makassar dalam rangka penyusunan tesis dengan judul :

***"Konfigurasi Hukum Ombudsman Kota Makassar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-VIII/2010"***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik – baiknya.

Makassar, 24 November 2022

Ombudsman Kota Makassar

**Ir. Ihwan Andi Patirov, SP, MM, MH, IPM**  
Ketua Komisisioner

Arsip



**KANTOR PERWAKILAN SULAWESI SELATAN**  
Jl. Sultan Alauddin, Alauddin Plaza Blok BB no. 17 Makassar  
kode pos 90221 telp./whatsapp 0811 236 3737  
website : www.ombudsman.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 1663/TU.01-27/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMU ISKANDAR  
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUCHTAR JAYA**  
Nomor Pokok : B012201020  
Program Studi : S2 – Ilmu Hukum  
Lembaga : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Judul Tesis : **“Konfigurasi Hukum Ombudsman Kota Makassar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-VIII/2010”**

telah melakukan *Penelitian* di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 November 2022

Kepala Perwakilan,  
  
Ismu Iskandar



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



H. Muchtar Jaya, S.H., M.Hum., M.H lahir di Tobatang, Kec. Pammana, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, 25 Februari 1998, merupakan anak ke-2 (kedua) dari pasangan H. Muh. Tang dan Hj. Singke. Tahun 2019, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SDN 296 Lapaukke.

Tahun 2012 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di SMPN 3 Pammana. Tahun 2015 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMAN 1 Pammana. Tahun 2019 menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019). Tahun 2020 menempuh pendidikan Strata 2 (S2) pada 2 (dua) Universitas, yakni: Universitas Hasanuddin dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Tahun 2022 menyelesaikan S2 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selanjutnya pada tahun 2023 menyelesaikan S2 di Universitas Hasanuddin dengan Tugas Akhir Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Ombudsman Kota Makassar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010”.